

Gerakan Kiri dan Demokratisasi di Indonesia

Oleh: Rita Olivia Tambunan

Pendahuluan

Dalam artikel ini akan dibahas pendapat mereka yang berasal dari organisasi kiri tentang masalah-masalah dan pilihan-pilihan demokratisasi di Indonesia pasca 1998. Pada mereka akan ditanyakan apa yang dianggap masalah utama dalam demokratisasi di Indonesia, apa yang harus dilakukan untuk menghadapi masalah itu, dan bagaimana melakukannya. Pendapat mereka tersebut akan didiskusikan berdasarkan hasil temuan riset DEMOS tentang “Masalah-masalah dan Pilihan-pilihan Demokratisasi di Indonesia” putaran pertama yang telah selesai dilakukan pada awal tahun 2004 (selanjutnya dalam tulisan ini akan disingkat sebagai riset DEMOS putaran I).

Untuk kepentingan penulisan artikel ini, organisasi kiri (*left based organisation*) akan diartikan sebagai organisasi yang cita-cita perjuangannya adalah perwujudan keadilan sosial bagi seluruh lapisan masyarakat dengan jalan menghapus penindasan terhadap rakyat serta melawan kediktatoran modal dan kekuasaan. Secara umum organisasi kiri adalah organisasi yang memperjuangkan nasib kaum terpinggir dalam sistem politik dan ekonomi seperti buruh, petani, kaum miskin kota. Organisasi kiri percaya bahwa pembangunan seharusnya ditujukan untuk kebaikan setiap orang, dan bukan hanya untuk keuntungan segelintir orang saja. Ciri khas lain organisasi kiri adalah keyakinan pada jurang lebar antara dua kelas sosial dalam masyarakat (kelas pemilik modal dan kelas pekerja) sebagai salah satu sumber ketidakadilan sosial. Kelas pekerja diisi oleh mereka yang tidak memiliki akses terhadap modal dan alat produksi. Yang termasuk dalam kelas ini antara lain adalah buruh, tani, kaum miskin kota. Sebaliknya kelas pemodal adalah mereka yang menguasai modal dan alat produksi sehingga memiliki otoritas ekonomi yang jauh lebih besar, dan karena itu aksesnya pada kekuasaan politik jauh lebih besar, bahkan mendominasi, dibanding kelas pekerja. Organisasi kiri percaya bahwa untuk mewujudkan keadilan sosial, maka perlu ada porsi kekuasaan ekonomi dan politik yang diambil alih oleh kaum proletar dengan menggunakan kekuatan gerakan massa. Karenanya, seringkali dalam dinamika politik Negara, organisasi kiri mengambil peran sebagai organisasi oposisi.

Dalam konteks sosial-politik Indonesia kini, jika menggunakan indikator tegas dan memperhatikan trauma politik-historis yang ditinggalkan oleh era Orde Baru, agak sulit untuk menentukan masih ada/tidaknya keberadaan organisasi kiri. Tetapi dengan menggunakan rumusan tersebut di atas, paling tidak dapat diidentifikasi beberapa organisasi yang dapat digolongkan sebagai organisasi kiri di Indonesia saat ini.

Proses Demokrasi Prosedural

Gerakan demokrasi di Indonesia pasca 1998 mengalami pasang surut. Pertengahan tahun 1998, ketika gerakan mahasiswa mempelopori lahirnya gerakan reformasi dengan menurunkan Soeharto, seolah ada ‘darah’ baru untuk merevitalisasi konsep-konsep demokrasi yang pernah menjadi barang haram pada masa rejim diktator Orde Baru. Pasca tahun 1998, para aktor pro-demokrasi –secara sendiri maupun bersama– lebih memiliki peluang untuk melakukan berbagai

aktivitas memajukan gerakan demokrasi di Indonesia. Ini adalah sebuah ‘kemewahan’ yang tersedia setelah lebih dari 32 tahun masa kekuasaan Orde Baru, para aktor pro-demokrasi mengalami berbagai ancaman –fisik maupun psikis– untuk berkegiatan.

Hasil riset DEMOS putaran I menunjukkan bahwa 363 orang informan yang berasal dari 29 propinsi secara umum berpendapat terjadi perbaikan kualitas hak dan institusi demokrasi (selanjutnya disebut sebagai H/I demokrasi)¹ tertentu, khususnya H/I demokrasi yang berada pada kategori kewarganegaraan, hukum, dan hak-hak serta kategori masyarakat sipil yang berorientasi demokratis. Hal ini ditunjukkan dalam tabel sebagai berikut:

10 Besar Terbaik Kinerja H/I Demokrasi

Urutan	H/I Demokrasi	%	Kategori H/I Demokrasi
1	Kebebasan Berbicara, berserikat, dan berorganisasi	18,6%	Kewarganegaraan, Hukum, dan Hak-hak
2	Jaminan bagi pers, seniman, dan akademisi untuk bebas tanpa ancaman dan intimidasi menyuarakan kritik terhadap pemerintah/pihak-pihak yang berpengaruh	14,6%	Masyarakat Sipil yang Berorientasi Demokratis
3	Kebebasan membentuk partai, merekrut anggota, dan mengkampanyekan calon-calon untuk menduduki kekuasaan pemerintah	11,0%	Pemerintahan yang Representatif & Akuntabel
4	Partisipasi warga negara dalam organisasi-organisasi independen, kelompok-kelompok kewargaan, gerakan sosial, dan serikat buruh	10,5%	Masyarakat Sipil yang Berorientasi Demokratis
5	Kebebasan beragama, menggunakan bahasa, dan melestarikan kebudayaan	8,5%	Kewarganegaraan, Hukum, dan Hak-hak
6	Kebebasan untuk mendirikan serikat buruh	5,4%	Kewarganegaraan, Hukum, dan Hak-hak
7	Akses yang luas kepada media, unit kebudayaan, dan universitas untuk mendapatkan perspektif yang berbeda	5,0%	Masyarakat Sipil yang Berorientasi Demokratis
8	Kesetaraan dan emansipasi gender	4,3%	Kewarganegaraan, Hukum, dan Hak-hak
9	Transparansi, akuntabilitas, dan demokratis tidaknya organisasi-organisasi masyarakat sipil	3,4%	Masyarakat Sipil yang Berorientasi Demokratis
10	Penyelenggaraan pemilu yang bebas dan jujur serta mekanisme pemilihan yang transparan	3,0%	Pemerintahan yang Representatif & Akuntabel

Para informan juga menunjukkan 10 H/I demokrasi yang dianggap buruk kinerjanya, yaitu:

10 Besar Terburuk Kinerja H/I Demokrasi

Urutan	H/I Demokrasi	%	Kategori H/I Demokrasi
1	Kepatuhan pemerintah dan pejabat pemerintah terhadap hukum	10,5%	Kewarganegaraan, Hukum, dan Hak-hak
2	‘Keadilan untuk semua’ dan independensi lembaga peradilan	10,2%	Masyarakat Sipil yang Berorientasi Demokratis
3	Independensi partai-partai dari politik uang dan kekuasaan	9,1%	Pemerintahan yang Representatif & Akuntabel
4	Independensi kekuasaan pemerintah dan perlawanan	6,8%	Pemerintahan yang

¹ Pada riset putaran pertama ini, DEMOS mengidentifikasi 35 jenis hak dan institusi yang dianggap penting untuk memajukan tujuan-tujuan demokrasi, yaitu kontrol rakyat atas masalah-masalah publik atas dasar persamaan kedudukan politik. Ke-35 hak dan institusi demokrasi yang dapat digolongkan dalam 3 kategori besar yaitu (1) Kewarganegaraan, hukum, dan hak-hak; (2) Pemerintahan yang representatif dan akuntabel; dan (3) Masyarakat sipil yang berorientasi demokratis. Hak-hak demokrasi adalah yang menyangkut kebebasan atau jasa dimana individu atau kelompok diandaikan dijamin untuk mendapatkannya. Sedangkan institusi-institusi demokrasi secara umum dapat didefinisikan sebagai ‘aturan permainan’ (*rules of the game*). Institusi demokrasi formal misalnya dalam bentuk hukum dan perundang-undangan. Institusi demokrasi bisa juga diakui secara informal dalam bentuk ‘aturan perilaku’ (*rules of conduct*), misalnya partai politik haruslah mencerminkan pandangan dan kepentingan anggotanya.

	terhadap berbagai bentuk korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan		Representatif & Akuntabel
5	Pertanggungjawaban kekuasaan militer dan kepolisian pada pemerintahan sipil terpilih dan kepada publik	6,6%	Pemerintahan yang Representatif & Akuntabel
6	Hak bekerja/berusaha dan memperoleh jaminan sosial serta terpenuhinya kebutuhan dasar termasuk kesehatan	5,5%	Kewarganegaraan, Hukum, dan Hak-hak
7	Independensi pemerintah dari unit-unit paramiliter, tentara bayaran, premanisme, dan mafia	5,4%	Pemerintahan yang Representatif & Akuntabel
8	Sikap partai-partai terhadap isu-isu dan kepentingan vital di dalam masyarakat	4,8%	Pemerintahan yang Representatif & Akuntabel
9	Keterbukaan dan akuntabilitas pemerintahan terpilih di tingkat pusat dan daerah	3,6%	Pemerintahan yang Representatif & Akuntabel
10	Aksesibilitas wakil-wakil terpilih terhadap para konstituennya, dan petugas pelayanan publik pada masyarakat yang dilayani	3,6%	Masyarakat Sipil yang Berorientasi Demokratis

Ada dua hal yang bisa ditangkap dari data diatas. *Pertama*, sebagian besar dari 10 besar terbaik kinerja H/I demokrasi adalah H/I demokrasi yang berbicara tentang jaminan kebebasan, khususnya yang berkaitan dengan hak-hak sipil dan politik warganegara. Ini menunjukkan bahwa pada masa pasca 1998, para informan menganggap ada ruang gerak yang lebih besar untuk berkegiatan. Ada kesempatan lebih besar untuk membangun aliansi gerakan pro-demokrasi, baik melalui ruang sosial maupun pada ruang politik. Keleluasaan itu termasuk adanya jaminan atas kebebasan berpendapat dan menyatakan pikiran, yang didukung dengan jaminan kebebasan pers. *Kedua*, sebagian besar item yang termasuk dalam 10 besar terburuk kinerja H/I demokrasi adalah yang berkaitan dengan isu pemerintahan yang representatif dan akuntabel dan kemampuan partai-partai politik untuk bertindak sebagai representasi kepentingan anggotanya (=rakyat). Item H/I demokrasi yang dianggap bermasalah utamanya yang berkaitan dengan kemampuan instrumen demokrasi (pejabat publik, lembaga peradilan, kepolisian, militer, partai politik) untuk bekerja dengan akuntabilitas tinggi, merepresentasi kepentingan publik, serta merespon tuntutan publik.

Jika kedua tabel tersebut diperbandingkan, maka terlihat bahwa para informan berpendapat bahwa keleluasaan untuk berkegiatan tidak diimbangi dengan kinerja yang baik instrumen-instrumen demokrasi yang ada. Nampak ada hasil kerja yang tak seimbang ketika jaminan kebebasan, utamanya yang berkaitan dengan hak-hak sipil dan politik, makin baik sementara instrumen demokrasi yang ada menunjukkan kinerja yang memburuk.

Coen Husein Pontoh, Sekretaris Jenderal PDS (Perhimpunan Demokratik Sosialis), menganalisa situasi ini sebagai akibat dari transisi demokrasi yang hanya diarahkan pada sebuah proses demokrasi prosedural semata. Menurutnya, sebagian besar aktor pro-demokrasi yang ada meluangkan banyak energi pada proses pelembagaan demokrasi, bukan pada isi/substansi dari demokrasi. Sebagai contoh, Coen menyebutkan adanya berbagai bentuk kebijakan Negara yang mengakomodasi pembentukan institusi-institusi masyarakat sipil (ornop, kelompok-kelompok perempuan) atau pun upaya untuk mereformasinya institusi seperti Mahkamah Agung, DPR RI, dan pembentukan Komisi-komisi tertentu seperti Komisi Pemberantasan Korupsi, **Komisi Pemeriksaan Kekayaan Negara (KPKN)**. Sayangnya, tidak ada perhatian serius tentang siapa yang berhak untuk mengisi institusi-institusi demokrasi tersebut. Subyek yang dihasilkan adalah figur pemimpin yang tidak populer; tidak berasal dari dan tidak menyuarakan kepentingan rakyat. Akibatnya, keputusan-keputusan politiknya pun tidak populis dan terus-menerus diganggu oleh berbagai protes rakyat.

Coen menyatakan bahwa model transisi demokrasi yang mementingkan pembangunan prosedural demokrasi seperti ini sebenarnya lahir dari mereka yang pro-pasar bebas. Pada satu sisi ada pengakuan dan penghormatan atas hak-hak sipil dan politik, tetapi di sisi lain amat mendukung pemberlakuan pasar bebas yang abai pada isu hak-hak ekonomi-sosial-budaya (yang pada tataran tertentu memang selalu menjadi penghalang utama berlakunya pasar bebas). Pemimpin yang lahir dari situasi seperti ini adalah mereka yang lahir dari kekuatan oligarkhi modal yang amat bersandar pada kekuatan militer untuk menjaga agar program-program politiknya yang tidak populis bisa tetap berjalan. Itulah situasi Indonesia kini yang mengambil jalur demokrasi prosedural melahirkan situasi dimana (1) mengutamakan pembangunan institusi demokrasi, (2) pasar bebas semakin menunjukkan eksistensinya dalam kehidupan politik negara, (3) penghancuran kekuatan rakyat dengan terus memelihara suara massa mengambang, dan (4) militerisme yang terus berkesempatan bercokol dalam ruang politik. Ironisnya, menurut Coen, kebanyakan aktor pro-demokrasi saat ini justru menganggap bahwa situasi sekarang sudah baik dan walaupun demokrasi belum ideal ini hanyalah sebagai fase awal dari demokratisasi.

Persoalan Representasi dan Ketiadaan Alternatif Kepemimpinan Nasional

Persoalan utama dalam proses demokrasi prosedural adalah lemahnya keterwakilan konstituen dalam instrumen demokrasi sehingga tidak mampu mempengaruhi pembuatan berbagai kebijakan. Ini menyebabkan instrumen demokrasi semakin menjauh dari perannya untuk menjadi penjaga jaminan kebebasan demokrasi yang ada. Misalnya adalah bagaimana berbagai peraturan perundang-undangan yang baru disahkan dianggap tidak merepresentasi kepentingan rakyat. Contoh soal adalah UU No. 13/2003 tentang Ketenagakerjaan yang memangkas hak-hak buruh dalam bekerja (*rights in work*) dan keamanan kerja (*job security*) dengan mensahkan sistem kerja *outsourcing* berulang-ulang bagi buruh kerah biru. UU ini juga mengebiri hak mogok serikat buruh dengan menerapkan ancaman pidana bagi pemimpin kelompok/serikat buruh yang melakukan pemogokan secara “tidak sah”. Contoh lain adalah UU No. 7/2004 tentang Sumber Daya Air yang melegitimasi kewenangan berlebih (*excessive authority*) pada pemerintah tentang pemberian ijin bagi petani untuk menggunakan sumber daya air bagi usaha pertanian atau perikanan. Terhadap kedua UU ini, telah diajukan Hak Uji Materil (*Judicial Review*) ke Mahkamah Konstitusi, masing-masing oleh serikat-serikat buruh dan sebuah konfederasi petani-nelayan, untuk meminta pembatalan pemberlakuan kedua UU tersebut.

Lukman Hakim, Ketua II KPP-PRD, menyatakan lemahnya keterwakilan konstituen dalam instrumen demokrasi adalah persoalan utama dalam demokratisasi di Indonesia kini. Hal ini dikarenakan ‘belum adanya alternatif kepemimpinan nasional yang lahir dari gerakan oposisi’. Lukman menilai gerakan pro-demokrasi yang ada saat ini cenderung melakukan kritik terhadap kerja pemerintahan tanpa melakukan program konkrit untuk membangun opini dan melakukan pengorganisasian massa. Gerakan pro-demokrasi pasca tahun 1998 juga dinilai tidak memiliki konsep yang jelas untuk sanggup menawarkan sebuah model alternatif kepemimpinan nasional pasca Orde Baru.

Dita Indah Sari, Ketua Umum POPOR (Partai Oposisi Rakyat), berpendapat ketidakmampuan gerakan pro-demokrasi untuk menyodorkan alternatif kepemimpinan nasional untuk mengambil alih kekuasaan politik disebabkan dua hal utama. *Pertama*, gerakan pro-demokrasi Indonesia tidak memiliki basis ideologi sosialisme yang kuat Selama lebih dari 32 tahun pemerintahan Orde Baru berkuasa, nyaris tidak ada yang tersisa bagi gerakan kiri untuk membenahi diri kembali. Penghancuran sistematis yang dilakukan terhadap gerakan kiri bukan saja menyangkut

perangkat organisasi, tetapi juga hal-hal yang bersifat moral dengan penjungkirbalikan pengertian kesetiakawanan, solidaritas, toleransi antar aktor politik, bahkan kesempatan untuk *exercising* ideologi. Selain itu, luasnya spektrum perbedaan cara pandang dan berpikir menyulitkan para aktor pro-demokrasi untuk duduk bersama memulai sebuah diskursus tentang pentingnya gerakan pro-demokrasi bersatu dan menawarkan sebuah program konkrit demokratisasi pasca 1998.

Kedua, kelompok-kelompok pro-demokrasi mengambil posisi sektarian terhadap isu yang bukan konsentrasi kerjanya sehingga seringkali enggan untuk menilik persoalan secara holistik dan bergabung dengan kelompok lain di luar lingkup kerjanya. Dita menunjuk contoh enggan serikat tani dan serikat buruh bergabung dalam Barisan Oposisi Bersatu (BOB) yang menjelang Pemilu Presiden 5 Juli 2004 dibentuk untuk mengkampanyekan isu anti-militerisme, anti-Orde Baru, dan anti-neoliberalisme. Di sisi lain, kuatnya kepentingan eksistensi dari masing-masing kelompok pro-demokrasi memaksa mereka secara ‘genit’ mempertontonkan aksi-kerjanya tanpa pertimbangan serius tentang dampak yang dihasilkan. Dita mencontohkan soal amat ‘sporadisnya’ acara-acara peringatan kerusuhan 13 Mei 1998 pada bulan Mei 2004 yang lalu. Padahal menurutnya, seharusnya bisa dipusatkan dan diperingati secara bersama-sama sehingga pesan keprihatinan diskriminasi ras (Tiong Hoa) dapat lebih kuat dirasa gaungnya. POPOR sebenarnya berupaya untuk mengajak berbagai kelompok pro-demokrasi untuk bersama memperingati, namun upaya tersebut gagal.

Tiada alternatif kepemimpinan nasional yang disodorkan oleh gerakan oposisi menyebabkan aktor-aktor politik masa Orde Baru terus mendominasi berbagai instrumen demokrasi yang ada saat ini. Lukman memberi contoh, walau secara persentase jumlah elemen militer berkurang di parlemen, namun jelas kelihatan bahwa mereka terus mendominasi berbagai kebijakan pemerintahan. Kelompok-kelompok pro-demokrasi kalah setidakmampu menyodorkan tokohnya untuk mengadvokasi agenda-agenda demokratisasi substansial menjadi bagian kebijakan politik nasional. Kedua hal ini menyebabkan makin memburuknya kesejahteraan sosial masyarakat yang ditandai dengan makin mudahnya kekuatan neo-liberalisme merasuk dalam sendi perekonomian. Lukman menyatakan bahwa ini adalah bagian dari penjajahan asing yang secara *de facto* menjadi bagian dari situasi nasional Indonesia.

Ruang Politik yang Terabaikan

Pada riset DEMOS putaran I, atas pertanyaan tentang pilihan strategi yang digunakan untuk mencapai tujuan demokrasi nya, para informan memberi jawaban sebagai berikut:

NO	Pilihan Strategi	Prioritas 1	Prioritas 2	Prioritas 1 & 2
1	Melalui Masyarakat Sipil	69,3%	16,8%	47,1%
2	Melalui Masyarakat Sipil dan Sistem Politik	13,2%	22,3%	17,0%
3	Melalui Masyarakat Sipil dan Sistem Hukum	5,5%	16,8%	10,3%
4	Melalui Sistem Hukum	4,4%	17,8%	10,1%
5	Melalui Sistem Politik	1,8%	10,4%	5,5%
6	Melalui Sistem Hukum dan Sistem Politik	2,2%	9,9%	5,5%
7	Melalui Masyarakat Sipil, Sistem Hukum, dan Sistem Politik	3,6%	5,9%	4,6%

Data di atas menunjukkan para informan memiliki kecenderungan besar untuk menerapkan demokrasi langsung melalui kegiatan masyarakat sipil. Pilihan untuk bergerak melalui sistem politik, walaupun ada, amatlah sedikit dan jumlahnya tidak signifikan. Ini menandakan bahwa

kebanyakan informan belum menyadari bahwa wilayah politik, melalui representasi, adalah ruang yang ideal untuk memperbaiki H/I demokrasi.

Coen Husein Pontoh, menyatakan kini terdapat kecenderungan dimana aktor pro-demokrasi mengamini, bahkan sepatutnya, dengan model transisi demokrasi prosedural yang terjadi saat ini. Ia menunjuk tentang tak banyaknya aktor pro-demokrasi yang memberi perhatian serius pada masalah-masalah substansial dalam demokrasi seperti soal militerisme, privatisasi, dan PHK besar-besaran yang terus terjadi saat ini. Menurutnya, ada semacam apologia yang disampaikan terhadap situasi sekarang. Aktor pro-demokrasi cenderung berpendapat bahwa pada prinsipnya yang penting lembaga-lembaga demokrasi diadakan saja terlebih dahulu. Persoalan bahwa subyek yang mendominasi lembaga-lembaga tersebut tidaklah penting karena toh subyek akan terus berganti. Atas dasar pemikiran itu maka kebanyakan aktor pro-demokrasi memilih untuk 'berjuang' melalui jalur advokasi pada masyarakat sipil dengan harapan suatu ketika konstituen mampu untuk menguasai lembaga-lembaga demokrasi yang ada. Itulah sebabnya tak heran jika kebanyakan aktor pro-demokrasi cenderung memilih berkegiatan di masyarakat sipil ketimbang berperan melalui sistem politik. Coen berpendapat, sesungguhnya ini adalah pilihan yang berbahaya karena artinya membiarkan ruang politik tetap dikuasai oleh elit peninggalan Orde Baru dan militer.

Di sisi lain, Coen menyatakan adanya krisis ideologi di kalangan aktor pro-demokrasi yang mewujud dalam pernyataan bahwa aktor pro-demokrasi adalah non-partisan. Tanpa disadari ini adalah sebuah sikap yang mendukung pemberlakuan demokrasi prosedural yang memang memasang sekat-sekat bahwa urusan politik bukan urusan masyarakat sipil, tetapi urusan parlemen. Demokrasi prosedural memang menyerahkan suara mayoritas pada kekuasaan segelintir orang.

Dita Indah Sari menganalisa fenomena dengan didasarkan pada pengalaman mencoba mendorong gerakan pro-demokrasi untuk masuk ke wilayah politik.² Ia berpendapat kebanyakan aktor pro-demokratis –khususnya mereka yang berasal dari organisasi non-pemerintah– umumnya menolak untuk bergerak di wilayah politik dengan dua alasan utama. *Pertama*, kebanyakan aktor pro-demokrasi masih deranggapan bahwa partisipasinya dalam demokratisasi adalah gerakan moral semata. Padahal berbicara demokratisasi berarti adalah berbicara dalam ruang politik. Aktor pro-demokrasi sepatutnya merebut kekuasaan politik sehingga dapat mempengaruhi arah kebijakan politik negara untuk dapat lebih pro-demokrasi dan pro-rakyat. Karena itu menurutnya adalah salah kaprah jika aktor pro-demokrasi masih melakukan tindakan-tindakan apolitis seperti memboikot Pemilu atau tidak memilih (golput). Pemilu menurutnya adalah sebuah kesempatan untuk menyatukan dan menyatukan gerakan pro-demokrasi untuk secara demokratis mengintervensi kebijakan-kebijakan politik.

Kedua, kebanyakan aktor pro-demokrasi menganggap bahwa masuk ke wilayah politik berarti melepas independensi dan ketidakberpihakannya. Menurut Dita, ini adalah *mind-set* yang amat dipengaruhi oleh paham neo-liberalisme dimana masyarakat sipil tidak diharapkan berperan dalam ruang politik dan menyerahkan kewenangan itu pada segelintir politisi. Pendapat seperti ini seringkali muncul karena pengaruh kemauan pihak donor yang berpengaruh pada

² Partai Oposisi Rakyat (POPOR) terbentuk pada tanggal 27 Juli 2003. Pada awal pembentukannya POPOR mengajak para aktor pro-demokrasi untuk bergabung bersama menyatukan kekuatan oposisi. Namun hanya sedikit yang merespon positif. Partai ini beranggotakan individu, sekitar 20 organisasi massa, dan sebuah partai politik. Sedianya POPOR dibentuk untuk berkompetisi dalam Pemilu legislatif tanggal 5 April 2004 yang lalu. Namun gagal karena tidak lolos kualifikasi di KPU (Komisi Pemilihan Umum).

kelangsungan hidup organisasi. Jika pun ada aktor pro-demokrasi yang masuk ke ruang politik, mereka cenderung untuk bergabung pada partai politik yang besar. Sikap seperti ini dikritik sebagai sikap yang amat pragmatis, tidak mau repot untuk membangun sebuah kekuatan politik yang dimulai dari kelompok akar rumput.

Pilihan aktor pro-demokrasi untuk mengkonsentrasikan kegiatannya pada masyarakat sipil dan enggan untuk berkiprah lebih pada ruang politik sebenarnya berdampak negatif bagi gerakan pro-demokrasi sendiri. Jika diperhatikan lebih seksama, hampir tidak ada partai politik saat ini yang memperhitungkan serius kekuatan masyarakat sipil sebagai kekuatan politik yang signifikan. Setelah Pemilu legislatif tanggal 5 April 2004 yang lalu, 12 partai politik peserta Pemilu sempat membentuk Aliansi 12 Parpol untuk menyikapi hasil Pemilu dan menjajagi kemungkinan mengajukan calon presiden.³ Beberapa anggota Aliansi 12 Parpol sempat mengajukan usulan untuk membuka aliansi bagi keanggotaan organisasi pro-demokrasi. Namun usulan tersebut ditolak. Dita mengisyaratkan bahwa ini adalah sebuah fakta bahwa dampak sikap memasang batas untuk tidak bergerak di ruang politik menyebabkan partai politik juga mengalienasi gerakan masyarakat sipil dari isu-isu politik dan hanya mengambil keuntungan menjelang Pemilu untuk pemenangan suara.

Apa yang Harus Dilakukan

Untuk tidak memperparah situasi saat ini, Coen Pontoh berpendapat para aktor pro-demokrasi harus memulai kembali diskursus untuk mencari alternatif keluar dari mekanisme demokrasi prosedural yang sedang berjalan saat ini. Para aktor pro-demokrasi harus menyadari bahwa demokrasi prosedural seperti yang terjadi saat ini tidak akan membawa perubahan berarti, malahan justru akan menguatkan posisi aktor Orde Baru dan militer untuk menancapkan kekuatannya pada H/I demokrasi yang ada. Harus disadari bahwa model transisi demokrasi Indonesia saat ini adalah sebuah model yang berlaku di mana-mana di dunia yaitu *modernisation via internationalitation*. Model transisi demokrasi ini memang lebih mengutamakan demokratisasi prosedural dan pro-pasar bebas; memperalat masyarakat sipil untuk terus mengingatkan bahwa peran Negara hanyalah pada persoalan politik dan tidak boleh mengintervensi ruang ekonomi yang harus diserahkan pada pasar.

Coen Pontoh menyatakan bahwa gerakan pro-demokrasi di Indonesia harus melawan perkembangan ini dengan melakukan demokratisasi yang menentang berlakunya neo-liberalisme (*democratisation against neo-liberalism*). Belajar dari pengalaman demokrasi di Rusia, Coen menyatakan tidak ada bukti faktual bahwa pemberlakuan nasionalisme ekonomi menyebabkan kebangkrutan ekonomi suatu negara, justru pemberlakuan neo-liberalismelah yang menyebabkan kebangkrutan ekonomi negara. Satu-satunya kekuatan yang bisa menahan lajur neo-liberalisme adalah Negara. Dengan memberlakukan nasionalisme ekonomi, negara akan mampu berbicara lebih tentang peningkatan anggaran untuk kepentingan publik (kesehatan, pendidikan, subsidi kebutuhan pokok). Gagasan nasionalisme ekonomi adalah gagasan yang harus dikerjakan di dua aras secara bersamaan: demokratisasi dari bawah dan transformasi dari atas (*democratisation from below and transformation from above*). “Tidak boleh memberikan cek kosong kepada Pemerintah begitu saja.” Artinya rakyat harus memiliki ruang bebas untuk ikut menentukan arah kebijakan politik.

³ Aliansi 12 Parpol antara lain adalah PNBK-Eros Jarot, Partai Pelopor-Rachmawati Soekarnoputri, PBSD-Mochtar Pakpahan.

Lukman Hakim berpendapat bahwa sudah saatnya sekarang terjadi konsolidasi berbagai organisasi pro-demokrasi. Gerakan pro-demokrasi tidak akan mengalami kemajuan berarti apabila masing-masing kelompok mempertahankan sikap yang sektarian-eksklusif dan tidak mau menganalisa situasi secara holistik. Konsolidasi hanya bisa dilakukan apabila tersedia media strategi berupa “front persatuan oposisi” yang terdiri dari berbagai elemen masyarakat sipil (buruh, tani, miskin kota, profesional, mahasiswa). Front persatuan oposisi idealnya menjadi sebuah organisasi politik yang menjadi media aksi-aksi politik untuk bereaksi terhadap berbagai kebijakan Pemerintah. Pada akhirnya, organisasi politik tersebut diharapkan dapat berkembang menjadi partai politik yang kuat dan mampu merebut kekuasaan politik nasional. PRD secara konsisten melakukan upaya pembentukan organisasi oposisi, dengan secara aktif terlibat dalam berbagai gerakan massa yang dianggap strategis. Misalnya terlibat dalam berbagai aksi-aksi KAPB (Komite Anti Penindasan Buruh)⁴ dan aktif memasukkan usulan-usulan kegiatan bersama. PRD juga terlibat dalam pembentukan Koalisi Nasional pada awal tahun 2003 dengan menggunakan isu kenaikan harga BBM, telepon, dan TDL. Pertengahan tahun 2003, bersama dengan beberapa organisasi massa lainnya membentuk POPOR untuk menjadi peserta Pemilu 2004. Terakhir, PRD membentuk BOB (Barisan Oposisi Bersatu) bersama dengan organisasi buruh, pemuda, dan mahasiswa. BOB adalah aliansi politik yang diadakan untuk mengkampanyekan isu anti-militerisme, anti Orde Baru, dan anti neo-liberalisme menjelang Pemilu Presiden Juli 2004. Lukman menyebut bahwa keterlibatan PRD dalam tiga koalisi terakhir dilakukan dengan harapan dapat membantu “perluasan radikalisasi massa” dan menjadi cikal bakal pembentukan sebuah “front persatuan”. Jikapun usaha-usaha tersebut belum menunjukkan hasil yang maksimal, namun paling tidak ada media *exercise* yang tersedia sehingga pada akhirnya nanti diharapkan akan terbentuk sebuah organisasi politik yang kuat yang menyatukan seluruh kekuatan oposisi.

Dita Indah Sari juga berpendapat bahwa yang paling penting dilakukan sekarang adalah mengupayakan persatuan dari gerakan pro-demokrasi sehingga bersama mampu menentukan arah sinergi gerakannya. Ini dapat dilakukan apabila gerakan pro-demokrasi jeli untuk dapat “memanfaatkan momentum politik apa pun” yang dapat dipakai dengan mengusung isu-isu yang mendorong persatuan. Pemanfaatan momentum politik dapat bermanfaat untuk menjadi media pendidikan politik rakyat dan memperluas gerakan massa. Menurut Dita, “Setiap respon yang disampaikan terhadap sebuah momentum politik adalah investasi pada situasi masa datang.” Misalnya, menjelang pemilihan presiden, POPOR mengajak setiap organisasi pro-demokrasi melakukan berbagai kegiatan aksi untuk mengkampanyekan isu anti-militerisme. Hal ini dilakukan dengan kesadaran walaupun presiden terpilih nanti berlatar belakang militer, maka “dia tidak akan bertindak semena-mena memukul mundur liberalisasi politik yang sudah ada saat ini karena sudah dikoridori oleh gerakan anti-militerisme yang dibangun dari sekarang.” Kegiatan aksi seperti ini diharapkan akan terus menjadi kekuatan signifikan untuk nantinya dapat aktif mengkritisi pemerintahan baru hasil Pemilu 2004.

Dita mengakui bahwa hal ini tidaklah mudah untuk dilakukan mengingat kompleksnya dinamika gerakan pro-demokrasi di Indonesia. Ada kesulitan untuk menyatukan jika ajakannya dilontarkan

⁴ Ini adalah sebuah aliansi yang mengusung isu utama menentang pengesahan Paket 3 UU Perburuhan (UU No. 21/2000 tentang Serikat Buruh, UU No. 13/2003 tentang Ketenagakerjaan, dan UU No. 2/2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial). Aliansi yang berdiri pertengahan tahun 2001 ini terdiri dari berbagai serikat buruh di tingkat nasional/daerah/lokal, organisasi mahasiswa, ornop pemerhati perburuhan, dan PRD. Belakangan, aliansi ini juga melakukan berbagai kegiatan aksi untuk mengkampanyekan anti kebijakan neo-liberalisme Negara (mis, anti-privatisasi, anti utang luar negeri).

oleh elemen tertentu saja. Sikap saling mencurigai masih amat terasa mewarnai hubungan antara kelompok-kelompok pro-demokrasi. Untuk mengatasi kesulitan ini, diusulkan untuk dapat menemukan figur pemimpin yang berasal dari gerakan oposisi untuk mengambil peran karismatis menyatukan gerakan pro-demokrasi. Namun cara inipun tidak mudah dilakukan mengingat sulitnya mencari tokoh populer yang dapat diterima oleh semua kalangan, apalagi dalam konstalasi politik yang sedemikian ruwet saat ini.

Para informan riset DEMOS putaran I mengakui adanya defisit demokrasi dalam upaya pemobilisasian massa. Para informan riset ini menyatakan bahwa umumnya mereka masih amat mengandalkan figur pemimpin populer (19%) dan pola hubungan dukungan-imbalan (19%) dalam mengelola dan memobilisasi dukungan rakyat. Memang cara ini relatif berhasil digunakan pada kampanye dan advokasi kasus-kasus di sektor tertentu (seperti agraria, perburuhan, dan kaum miskin kota). Namun keberhasilannya hanyalah bersifat kasuistik, terutama apabila kasusnya bersifat aktual dan menarik simpati sesaat publik. Metode mobilisasi dukungan seperti ini terbukti tidak mampu bertahan dalam jangka panjang karena tiadanya pengorganisasian massa yang programatik. Nampaknya para aktor pro-demokrasi tidak sepenuhnya berhasil mengembangkan alternatif terhadap politik massa mengambang gaya Soeharto. Bahkan para aktor pro-demokrasi nyaris bisa dikatakan sebagai ‘demokrat mengambang’ yang hanya dimanfaatkan sebagai ‘mesin’ tujuan pragmatis gerakan massa sesaat karena setelah itu mereka tidak mampu melanggengkan, apalagi melembagakan, dukungan massa yang dipunyainya itu.

Alternatif yang Ideal tetapi Operasional

Gerakan kiri di Indonesia selalu mengalami kesulitan untuk memperluas gerakannya. Dinyatakan bahwa secara historis ini adalah sebuah akibat dari tindakan penghancuran sistematis terhadap gerakan kiri yang dimulai sejak jaman Orde Baru. Menurut Coen Pontoh, yang dihancurkan bukan saja gerakan kiri tetapi juga gerakan radikal yang menuntut keterlibatan mayoritas dalam proses pengambilan kebijakan. Penghancuran sistematis ini terbilang sukses karena sampai saat ini pun membekas amat traumatik bahkan sampai ke pelosok-pelosok desa. Selain itu, rejim Soeharto juga amat berhasil mengembangkan metode ‘massa mengambang’ yang berakibat sampai sekarang kebanyakan awam masih beranggapan bahwa ‘politik itu kotor’ sehingga ogah untuk beraktivitas, bahkan berdiskusi isu politik.

Di sisi lain, gerakan kiri di Indonesia terkesan tidak mampu menyampaikan alternatif yang kontekstual, sesuai dengan situasi dan kondisi yang berlaku, untuk dituangkan dalam program kerja yang ideal dan operasional. Alternatif yang disampaikan sifatnya klasik, itu-itu saja, dan terkesan jauh dari konteks kekinian; tidak mampu menyandingi apa yang disajikan oleh neo-liberalisme, yang modifikasi kreativitasnya demikian liat mengikuti perkembangan rakyat. Coen menunjuk misalnya, ketika dalam situasi krisis ekonomi seperti sekarang ini rakyat yang tidak punya alternatif lain selain bertahan hidup, menjadi kebingungan dan menghindar jika gagasan yang dilontarkan adalah isu anti-militerisme dan anti-neo-liberalisme tanpa ada penjabaran yang jelas dan konkrit. Jika terus-menerus seperti ini maka gerakan kiri akan semakin kehilangan dukungan rakyat.

Coen menyarankan bahwa sudah saatnya gerakan kiri harus menawarkan alternatif yang, selain ideal, bumi dan operasional. Alternatif tersebut harus mampu dijelaskan secara kontekstual sehingga mudah ditangkap oleh rakyat dan juga ‘masuk akal’ dan tidak mengawang-awang. Sudah tidak mungkin hanya menawarkan alternatif yang sifatnya jargon semata seperti “Komite

Rakyat” atau “Pemerintahan Rakyat Miskin” tanpa kemampuan untuk menjabarkannya dalam sebuah program kerja yang operasional dan programatik. Misalnya saja, untuk menyampaikan gagasan “demokrasi tidak mungkin dilakukan dengan model ekonomi pasar bebas”, maka harus ada sebuah taktik pengorganisasian yang menggabungkan kegiatan advokasi dan kegiatan yang bersifat, misalnya, *income generating*, membantu rakyat meningkatkan taraf ekonominya dengan cara yang sederhana.

Dita Sari mengakui adanya anggapan bahwa gagasan-gagasan yang dilontarkan oleh organisasi kiri seringkali dianggap terlalu ideal dan tidak realistis. Namun Dita berargumen bahwa pengalaman juga membuktikan bahwa pemikiran-pemikiran yang terlalu pragmatis tidak dapat menjawab persoalan-persoalan isu demokrasi yang ada. Karena itu tidak ada jalan lain selain harus bersusah-susah untuk memikirkan program yang ideal sifatnya. Dikatakan bahwa pokok persoalan adalah tidak terbiasanya gerakan pro-demokrasi untuk mengambil tempat sebagai oposisi. Seringkali hal ini menyebabkan rakyat gerakan pro-demokrasi melontarkan gagasan yang amat pragmatis.

Pada akhirnya, baik Lukman Hakim, Dita Indah Sari, maupun Coen Pontoh bersepakat bahwa pembangunan basis sosial adalah hal yang *urgent* untuk dilakukan oleh gerakan kiri. Gerakan pro-demokrasi saat ini dianggap cenderung terjebak pada kerja-kerja yang mengandalkan kekuatan kampanye melalui media, lobby, atau negosiasi, dan melupakan pendidikan politik yang harus dikerjakan di tingkat akar rumput. Dengan keterbatasan dana dan sumber daya manusia, cara-cara ini dianggap tidak banyak berhasil guna, mengingat elit politik/militer dan kekuatan neo-liberalisme memiliki sumber yang lebih luas dan besar untuk meng-*counter*. Karena itu, sambil terus menjaga kemandiriannya, gerakan kiri diharapkan dapat dengan cerdas menjadi pelopor untuk bekerja lebih serius dalam membangun basis sosial di tingkat akar rumput dengan menggunakan isu-isu kontekstual.